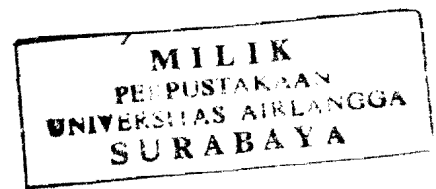


SKRIPSI

TYAS ASAHITA

**TINJAUAN YURIDIS
PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
TENAGA KERJA WANITA YANG BEKERJA
DI BIDANG KONSTRUKSI**



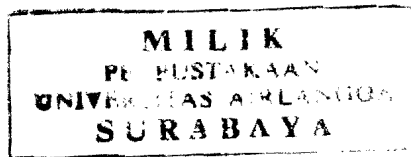
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2000

**TINJAUAN YURIDIS
PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
TENAGA KERJA WANITA YANG BEKERJA
DI BIDANG KONSTRUKSI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**



Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

Lanny Ramli, SH., M.Hum
NIP. 131. 878. 388

Penyusun,

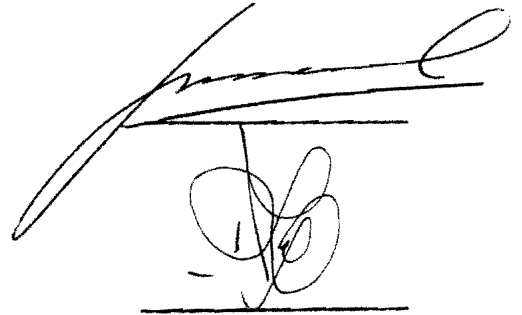
Tyas Asahita
NIM. 039413947

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

Telah diuji dihadapan Panitia Penguji pada tanggal : 20 Maret 2000

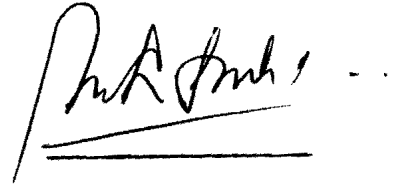
Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Machsoen Ali, S.H., MS.

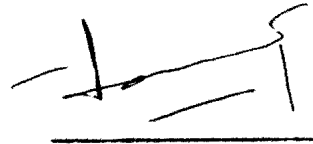
Handwritten signature of Machsoen Ali, S.H., MS. The signature is written in black ink on a white background, with a horizontal line underneath.

Anggota : R. Indiarso, S.H.

Dr. M.L. Souhoka, S.H., MS.

Handwritten signature of Dr. M.L. Souhoka, S.H., MS. The signature is written in black ink on a white background, with a horizontal line underneath.

Lanny Ramli, S.H., M.Hum

Handwritten signature of Lanny Ramli, S.H., M.Hum. The signature is written in black ink on a white background, with a horizontal line underneath.

BAB IV

Kesimpulan dan Saran



4.1. Kesimpulan

Pembahasan di bab-bab terdahulu tentang pekerjaan konstruksi bagi tenaga kerja wanita ini dapat disimpulkan :

1. Pengaturan K3 bagi tenaga kerja konstruksi wanita saat ini tidak sejalan dengan perkembangan yang sangat maju terlihat dari peraturan-peraturan yang dipakai untuk mengatur pekerjaan konstruksi wanita adalah peraturan lama Maatregelen yang tidak seluruhnya mencakup kebutuhan pengaturan pekerjaan wanita terutama pekerjaan konstruksi, sedangkan pekerjaan konstruksi itu sendiri sudah sangat berkembang baik menurut jenis pekerjaan, alat-alat pembantu dan lingkup pekerjaannya. Maatregelen itu sendiri sangatlah tidak memadai bagi pengaturan pekerjaan wanita secara umum karena pasal-pasal yang berkenaan dengan pengaturan pekerjaan wanita secara umum sampai saat ini pun belum berlaku, apalagi untuk pengaturan pekerjaan wanita secara khusus di bidang konstruksi.

Pembagian pekerjaan bagi tenaga kerja konstruksi tidak diatur dalam Buku Pedoman SP3K, hal ini berarti tidak diadakannya pembedaan status kelamin dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi, kecuali dalam beberapa hal dianggap membahayakan keselamatan dan kesehatan wanita dengan alasan yang jelas. SP3K dan Maatregelen dalam hal ini tidak bertentangan karena SP3K sebagai

peraturan yang terbaru juga membuat pengecualian, ini justru melindungi kepentingan pekerja wanita itu sendiri, dan tidak menghalangi wanita untuk bekerja pada kegiatan konstruksi.

2. Sanksi bagi pelanggaran penyelenggaraan K3 bagi tenaga kerja konstruksi wanita sangat tidak memadai, besarnya sanksi tidak seimbang dengan kerugian yang mungkin ditimbulkan yang ditanggung oleh pekerja konstruksi pada umumnya dan pekerja konstruksi wanita pada khususnya.

4.2. Saran-Saran

Saran-saran yang dapat diberikan setelah pembahasan :

1. Pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban menjamin seluruh rakyatnya memperoleh penghidupan secara layak segera mungkin membuat dan memberlakukan peraturan dan undang-undang yang menjamin K3 bagi tenaga kerja terutama dalam pekerjaan konstruksi.
2. Proses pemberlakuan peraturan tersebut seharusnya tidak perlu melalui tahap sosialisasi yang terlalu lama (UU No.25/1997 memerlukan waktu kurang lebih 3 tahun), dan seharusnya dalam jangka waktu sosialisasi tersebut juga sudah dipersiapkan segala peraturan pelaksanaannya, sehingga ketidaklengkapan peraturan tidak terjadi lagi seperti waktu sebelumnya.